



SK Menteri Hukum RI No. AHU-0007962.AH.01.04.Tahun 2025
Jl. Janis KPR BRI No 15 Kilometer 13, Klamana, Sorong Timur, Papua Barat Daya.
Institut.usba@gmail.com - www.institutusba.org

Nomor : 108/USBA/SR/VIII/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas TOR Kegiatan
Perihal : **Undangan Membuka Kegiatan dan Menjadi Narasumber Kegiatan Heyul Pelei Koranu Fyak (Jumpa Akbar Masyarakat Adat Raja Ampat)**

Kepada

Yth. Wakil Bupati Raja Ampat

di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan **HEYUL PELEI KORANU FYAK (Jumpa Akbar Masyarakat Adat Raja Ampat) Arborek 2026** yang akan diselenggarakan pada tanggal 20–23 Agustus 2026 di Kampung Arborek, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, kami dari Forum Gelar Senat Raja Ampat bersama Institut USBA dengan hormat mengundang **Bapak Wakil Bupati Raja Ampat** untuk berkenan hadir dan sekaligus menjadi narasumber pada sesi:

Dialog Multipihak

“Masyarakat Adat sebagai Penjaga Iklim dan Masa Depan Pulau-Pulau Kecil”

Adapun pelaksanaan sesi tersebut adalah sebagai berikut:

- **Hari/Tanggal** : Jumat, 21 Agustus 2026
- **Waktu** : Pukul 09.00 – 12.00 WIT
- **Tempat** : Kampung Arborek, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat

Forum ini akan mempertemukan pemimpin adat, perempuan adat, pemuda adat, tetua adat, pemerintah daerah, akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat nasional dan internasional, serta mitra nasional dan internasional untuk membahas masa depan Raja Ampat yang berkeadilan, menghormati hak masyarakat adat, memperkuat peran masyarakat adat sebagai penjaga iklim, serta menjaga keberlanjutan hutan, laut, dan pulau-pulau kecil bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

HEYUL PELEI KORANU FYAK merupakan ruang musyawarah, konsolidasi, dan solidaritas masyarakat adat Raja Ampat yang mempertemukan pemimpin adat, perempuan adat, pemuda adat, tetua adat, pemerintah daerah, akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat nasional dan internasional, serta mitra nasional dan internasional untuk memperkuat peran masyarakat adat sebagai penjaga iklim dan masa depan pulau-pulau kecil.

Adapun rangkaian kegiatan akan dilaksanakan pada:

- **Tanggal:** 20–23 Agustus 2026
- **Tempat:** Kampung Arborek, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat



SK Menteri Hukum RI No. AHU-0007962.AH.01.04.Tahun 2025
Jl. Janis KPR BRI No 15 Kilometer 13, Klamana, Sorong Timur, Papua Barat Daya.
Institut.usba@gmail.com - www.institutusba.org

Kegiatan ini meliputi:

- Dialog multipihak;
- Forum perempuan adat;
- Forum pemuda adat;
- Forum tetua adat;
- Dialog kebudayaan;
- Musyawarah masyarakat adat;
- Aksi penanaman mangrove;
- Konservasi terumbu karang;
- Deklarasi Arborek 2026.

Kami memandang kehadiran Bapak Wakil Bupati Raja Ampat sangat penting untuk memberikan perspektif pemerintah daerah mengenai arah pembangunan Raja Ampat yang berkelanjutan, perlindungan masyarakat adat, penguatan budaya dan ekonomi lokal, serta sinergi antara pembangunan, konservasi, dan kesejahteraan masyarakat.

Bersama surat ini kami lampirkan TOR dan rundown kegiatan sebagai bahan informasi lebih lanjut. Besar harapan kami BLUD Raja Ampat dapat berkenan hadir dan mengikuti rangkaian kegiatan selama tanggal 20–23 Agustus 2026.

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu, kami menyampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Sorong, 15 Agustus 2026

Hormat kami,

YAYASAN UNGGUL SINERGI BYAK ABADI (INSTITUT USBA)



Direktur
Charles Imbir



SK Menteri Hukum RI No. AHU-0007962.AH.01.04.Tahun 2025
Jl. Janis KPR BRI No 15 Kilometer 13, Klamana, Sorong Timur, Papua Barat Daya.
Institut.usba@gmail.com - www.institutusba.org

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)

HEYUL PELEI KORANU FYAK

(Jumpa Akbar Masyarakat Adat Raja Ampat)

TEMA

"Menguatkan Persaudaraan Adat, Menyatukan Agenda Bersama, Menjaga Tanah dan Laut Raja Ampat untuk Dunia."

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Raja Ampat merupakan wilayah kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Di wilayah ini hidup masyarakat adat yang sejak turun-temurun mengelola tanah, laut, hutan, dan pulau-pulau kecil berdasarkan hukum adat, pengetahuan tradisional, serta nilai-nilai budaya yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat adat, wilayah adat bukan hanya ruang geografis, tetapi merupakan identitas, ruang hidup, sumber penghidupan, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Dalam perjalanan sejarahnya, masyarakat adat Raja Ampat telah mengembangkan sistem tata kelola wilayah yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan kelestarian alam. Berbagai praktik pengelolaan sumber daya alam, pengaturan pemanfaatan wilayah, penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat, serta berbagai bentuk kearifan lokal menjadi bagian penting dari sistem sosial masyarakat yang hingga kini masih dijalankan. Sistem tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat bukan hanya penerima manfaat dari sumber daya alam, tetapi merupakan pemegang hak sekaligus pelaku utama dalam menjaga keberlanjutan wilayah adat.

Berbagai penelitian dan pengalaman di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa wilayah yang dikelola oleh masyarakat adat umumnya memiliki tingkat kelestarian ekosistem yang lebih baik. Oleh karena itu, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat adat tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati, memperkuat ketahanan iklim, melindungi pulau-pulau kecil, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Di tengah berbagai perubahan yang terjadi, masyarakat adat Raja Ampat menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dinamika pembangunan daerah, meningkatnya tekanan terhadap wilayah adat, berkembangnya berbagai bentuk investasi, perubahan iklim, pertumbuhan sektor pariwisata, serta perubahan sosial yang berlangsung cepat menuntut masyarakat adat untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan, kepemimpinan, dan persatuan. Pada saat yang sama, kebutuhan akan regenerasi kepemimpinan adat menjadi semakin penting agar pengetahuan, nilai-nilai adat, serta sistem pengelolaan wilayah tetap dapat diwariskan kepada generasi muda.

Berangkat dari kondisi tersebut, penguatan masyarakat adat tidak dapat dilakukan melalui kegiatan yang bersifat parsial ataupun insidental. Diperlukan suatu proses yang berkelanjutan untuk memperkuat organisasi masyarakat adat, menyiapkan kader-kader muda, membangun konsolidasi antarsuku dan sub-suku, serta menyusun agenda perjuangan bersama sebagai arah gerakan masyarakat adat Raja Ampat dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.



SK Menteri Hukum RI No. AHU-0007962.AH.01.04.Tahun 2025
Jl. Janis KPR BRI No 15 Kilometer 13, Klamana, Sorong Timur, Papua Barat Daya.
Institut.usba@gmail.com - www.institutusba.org

Proses konsolidasi tersebut sesungguhnya telah dimulai melalui **Forum Gelar Senat Raja Ampat I** yang diselenggarakan pada **1–3 Oktober 2025**. Forum ini menjadi tonggak penting konsolidasi masyarakat adat Raja Ampat dan menghasilkan **8 Maklumat Bersama** yang memuat komitmen kolektif dalam memperkuat persatuan masyarakat adat, menjaga wilayah adat, mendorong pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta memperkuat peran masyarakat adat dalam pembangunan Raja Ampat. Delapan maklumat tersebut menjadi pijakan awal bagi penguatan gerakan masyarakat adat dan menjadi arah bersama yang perlu diterjemahkan ke dalam langkah-langkah yang lebih operasional.

Sebagai tindak lanjut dari hasil Forum Gelar Senat Raja Ampat I, dilaksanakan **Rapat Koordinasi Forum Gelar Senat Raja Ampat** pada **20 Juni 2026**. Rapat koordinasi ini bertujuan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan delapan maklumat sekaligus menyusun agenda strategis lanjutan dalam memperkuat gerakan masyarakat adat Raja Ampat. Melalui forum tersebut disepakati bahwa penguatan masyarakat adat harus dibangun melalui proses kaderisasi, konsolidasi, advokasi, dan musyawarah yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Oleh karena itu, rapat koordinasi merekomendasikan tiga agenda strategis, yaitu: **(1) penyelenggaraan Sekolah Kader Masyarakat Adat Raja Ampat Tahun 2026; (2) penguatan agenda advokasi dan perlindungan masyarakat adat; serta (3) penyelenggaraan HEYUL PELEI KORANU FYAK (Jumpa Akbar Masyarakat Adat Raja Ampat) sebagai forum musyawarah tertinggi masyarakat adat Raja Ampat.**

Sebagai implementasi dari rekomendasi tersebut, **Sekolah Kader Masyarakat Adat Raja Ampat Tahun 2026** diselenggarakan pada **20–22 Juli 2026** dengan mengusung semangat **Belajar • Bersatu • Bergerak**. Sekolah kader menjadi ruang pembelajaran, kaderisasi, dialog lintas generasi, dan penguatan kapasitas bagi pemuda dan perempuan adat dari berbagai suku di Raja Ampat. Lebih dari sekadar kegiatan pelatihan, sekolah kader menjadi ruang untuk merumuskan arah perjuangan bersama masyarakat adat dalam menghadapi tantangan pembangunan, perlindungan wilayah adat, serta regenerasi kepemimpinan.

Salah satu capaian utama sekolah kader adalah lahirnya **14 Pokok Arah Perjuangan Masyarakat Adat Raja Ampat**. Dokumen ini memuat berbagai agenda strategis mengenai penguatan kelembagaan adat, perlindungan hak ulayat, pengakuan wilayah adat, kepemimpinan pemuda dan perempuan adat, pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat adat, konservasi, pendidikan, ekonomi, hingga penguatan diplomasi masyarakat adat. Keempat belas pokok arah perjuangan tersebut tidak dimaksudkan sebagai keputusan final, melainkan sebagai dokumen awal yang akan dibawa kembali ke kampung, sub-suku, dan suku untuk memperoleh masukan, kritik, serta penyempurnaan melalui proses musyawarah masyarakat adat.

Hasil konsultasi awal menunjukkan bahwa berbagai isu strategis yang berkembang di tingkat kampung, sub-suku, maupun suku tidak hanya berkaitan dengan pengakuan hak-hak masyarakat adat, tetapi juga menyangkut perlindungan wilayah adat, keberlanjutan hutan dan laut Raja Ampat, penguatan kepemimpinan perempuan dan pemuda adat, perlindungan pulau-pulau kecil, perubahan iklim, serta posisi masyarakat adat dalam pembangunan daerah. Pada saat yang sama, meningkatnya perhatian nasional dan internasional terhadap Raja Ampat menghadirkan peluang bagi masyarakat adat untuk memperkuat diplomasi, memperluas jejaring kerja sama, serta menyampaikan secara langsung perspektif masyarakat adat mengenai masa depan Raja Ampat kepada dunia.

Selain sebagai ruang konsolidasi internal, masyarakat adat Raja Ampat juga memandang penting membangun ruang dialog yang lebih luas dengan pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, media, serta masyarakat adat dari berbagai wilayah Indonesia maupun dunia. Dialog tersebut diperlukan untuk memperkuat kolaborasi, membangun saling pengertian, serta memperluas dukungan terhadap perlindungan masyarakat adat dan wilayah adat sebagai fondasi pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Seluruh rangkaian proses tersebut akan mencapai puncaknya melalui penyelenggaraan **HEYUL PELEI KORANU FYAK (Jumpa Akbar Masyarakat Adat Raja Ampat)** yang akan dilaksanakan pada **20–23 Agustus 2026** di Kampung Arborek, Kabupaten Raja Ampat. Forum ini dirancang sebagai ruang musyawarah akbar yang mempertemukan seluruh unsur masyarakat adat Raja Ampat bersama pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, media, serta delegasi masyarakat adat dari berbagai wilayah Indonesia dan dunia.

Dalam forum ini, **14 Pokok Arah Perjuangan Masyarakat Adat Raja Ampat** akan menjadi bahan utama musyawarah untuk dibahas, diperkaya, disempurnakan, dan disepakati sebagai **Agenda Bersama**



SK Menteri Hukum RI No. AHU-0007962.AH.01.04.Tahun 2025
Jl. Janis KPR BRI No 15 Kilometer 13, Klamana, Sorong Timur, Papua Barat Daya.
Institut.usba@gmail.com - www.institutusba.org

Masyarakat Adat Raja Ampat. Selain menghasilkan **Deklarasi Arborek 2026**, forum ini juga akan menetapkan **Peta Jalan Forum Pemuda Adat Raja Ampat, Peta Jalan Forum Perempuan Adat Raja Ampat**, serta **Rencana Aksi Bersama Masyarakat Adat Raja Ampat Tahun 2026–2030** sebagai pedoman pelaksanaan agenda perjuangan masyarakat adat pada tahun-tahun mendatang. Bersamaan dengan itu, forum akan memperkuat jejaring solidaritas masyarakat adat pulau-pulau kecil, memperluas kerja sama nasional dan internasional, serta membangun komitmen multipihak dalam mendukung perlindungan masyarakat adat dan keberlanjutan Raja Ampat.

Dengan demikian, **HEYUL PELEI KORANU FYAK** bukan sekadar forum musyawarah ataupun kegiatan seremonial, melainkan puncak dari proses kaderisasi, konsolidasi, dan diplomasi masyarakat adat Raja Ampat yang telah dibangun sejak Forum Gelar Senat Raja Ampat Tahun 2025. Forum ini mengintegrasikan musyawarah adat, dialog multipihak, forum solidaritas masyarakat adat pulau-pulau kecil, pertukaran pengetahuan masyarakat adat lintas negara, penguatan kepemimpinan perempuan dan pemuda adat, perayaan kebudayaan, aksi nyata pelestarian lingkungan, serta komunikasi publik dalam satu rangkaian yang utuh.

Melalui forum ini diharapkan lahir kesepakatan bersama yang memperkuat persatuan masyarakat adat, memperkokoh posisi masyarakat adat sebagai pemegang hak atas wilayah adat, memperluas solidaritas nasional dan internasional, serta menegaskan bahwa perlindungan Raja Ampat hanya dapat diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai penjaga tanah, laut, hutan, dan pulau-pulau kecil.

Dalam konteks tersebut, **HEYUL PELEI KORANU FYAK** juga menjadi momentum untuk menyuarakan komitmen bersama masyarakat adat Raja Ampat terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, perlindungan hutan Papua dan pulau-pulau kecil, serta kontribusi masyarakat adat dalam menghadapi krisis iklim global. Melalui forum ini, masyarakat adat Raja Ampat menegaskan bahwa menjaga wilayah adat berarti menjaga Raja Ampat, menjaga hutan Papua, melindungi pulau-pulau kecil, serta turut menjaga masa depan iklim dunia bagi generasi yang akan datang.

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL DAN STRATEGIS

2.1 DASAR PEMIKIRAN

Penyelenggaraan **HEYUL PELEI KORANU FYAK (Jumpa Akbar Masyarakat Adat Raja Ampat)** merupakan bagian dari proses konsolidasi masyarakat adat Raja Ampat yang dibangun secara bertahap melalui **Forum Gelar Senat Raja Ampat I Tahun 2025, Rapat Koordinasi Forum Gelar Senat Raja Ampat Tahun 2026**, serta **Sekolah Kader Masyarakat Adat Raja Ampat Tahun 2026**. Forum ini menjadi ruang musyawarah tertinggi masyarakat adat untuk menyusun arah perjuangan bersama dalam memperkuat kelembagaan adat, menjaga wilayah adat, membangun kepemimpinan lintas generasi, serta memperluas kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.

Penyelenggaraan kegiatan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis sebagai berikut.

1. **Masyarakat adat merupakan pemegang hak sekaligus pengelola utama wilayah adat Raja Ampat.** Penguatan masyarakat adat merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pengelolaan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan, serta menghormati hak-hak masyarakat adat.
2. **Perlindungan Raja Ampat tidak dapat dipisahkan dari pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.** Keberhasilan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, ketahanan iklim, serta pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada kuatnya posisi masyarakat adat sebagai pemegang hak atas wilayah adatnya.
3. **Diperlukan ruang musyawarah bersama yang mempertemukan seluruh suku dan sub-suku masyarakat adat Raja Ampat.** Musyawarah menjadi mekanisme utama dalam membangun



SK Menteri Hukum RI No. AHU-0007962.AH.01.04.Tahun 2025
Jl. Janis KPR BRI No 15 Kilometer 13, Klamana, Sorong Timur, Papua Barat Daya.
Institut.usba@gmail.com - www.institutusba.org

konsensus, menyelesaikan perbedaan pandangan, serta menyusun agenda perjuangan bersama yang mewakili kepentingan seluruh masyarakat adat.

4. **Regenerasi kepemimpinan adat merupakan kebutuhan strategis.** Keterlibatan pemuda dan perempuan adat menjadi faktor penting dalam menjamin keberlanjutan kelembagaan adat, pewarisan pengetahuan tradisional, serta lahirnya pemimpin-pemimpin masyarakat adat di masa depan.
5. **Masyarakat adat Raja Ampat perlu memperkuat posisi dalam dinamika pembangunan daerah.** Perubahan sosial, ekonomi, lingkungan, investasi, pariwisata, dan perubahan iklim menuntut masyarakat adat memiliki kapasitas organisasi, kepemimpinan, advokasi kebijakan, dan kemampuan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.
6. **Solidaritas masyarakat adat perlu diperluas hingga tingkat nasional dan internasional.** Pengalaman masyarakat adat dalam menjaga wilayah adat merupakan bagian dari gerakan global untuk perlindungan keanekaragaman hayati, pulau-pulau kecil, dan ketahanan iklim. Oleh karena itu, diperlukan ruang untuk memperkuat jejaring kerja sama, saling belajar, serta membangun solidaritas dengan masyarakat adat dari berbagai wilayah Indonesia maupun dunia.
7. **Hasil Sekolah Kader Masyarakat Adat Raja Ampat Tahun 2026 perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme musyawarah yang lebih luas.** Empat Belas Pokok Arah Perjuangan yang telah dirumuskan menjadi dokumen awal yang harus dibahas, diperkaya, dan disepakati bersama menjadi Agenda Bersama Masyarakat Adat Raja Ampat.
8. **Perlindungan wilayah adat memerlukan gerakan bersama yang mengintegrasikan musyawarah, aksi nyata, diplomasi, dan komunikasi publik.** Selain menghasilkan keputusan strategis, masyarakat adat perlu memperkuat pendidikan publik, dokumentasi, kampanye, aksi konservasi, serta kolaborasi multipihak agar perjuangan masyarakat adat memperoleh dukungan yang lebih luas.
9. **HEYUL PELEI KORANU FYAK merupakan momentum strategis untuk memperkuat posisi masyarakat adat dalam agenda nasional dan global.** Forum ini menjadi ruang untuk menyampaikan komitmen masyarakat adat Raja Ampat terhadap pengakuan hak-hak masyarakat adat, perlindungan hutan Papua, perlindungan pulau-pulau kecil, serta kontribusi masyarakat adat dalam menghadapi krisis iklim global.

2.2 PRINSIP PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan HEYUL PELEI KORANU FYAK dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Menghormati hukum adat, nilai-nilai budaya, dan kearifan lokal masyarakat adat Raja Ampat.
- Menjunjung tinggi musyawarah mufakat sebagai mekanisme utama dalam pengambilan keputusan.
- Menjamin keterwakilan seluruh suku dan sub-suku masyarakat adat.
- Mendorong partisipasi aktif perempuan adat, pemuda adat, dan generasi muda.
- Mengedepankan kesetaraan, penghormatan, persaudaraan, dan solidaritas.
- Menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan.
- Memperkuat kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha yang bertanggung jawab, serta mitra pembangunan.
- Mengedepankan pertukaran pengetahuan (*knowledge exchange*) antar masyarakat adat sebagai bagian dari pembelajaran bersama.
- Memanfaatkan komunikasi publik dan diplomasi masyarakat adat untuk memperluas dukungan terhadap perlindungan wilayah adat dan keberlanjutan Raja Ampat.



SK Menteri Hukum RI No. AHU-0007962.AH.01.04.Tahun 2025
Jl. Janis KPR BRI No 15 Kilometer 13, Klamana, Sorong Timur, Papua Barat Daya.
Institut.usba@gmail.com - www.institutusba.org

- Menempatkan keberlanjutan lingkungan, perlindungan wilayah adat, dan kesejahteraan masyarakat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

2.3 MAKSUD

Menyelenggarakan **HEYUL PELEI KORANU FYAK (Jumpa Akbar Masyarakat Adat Raja Ampat)** sebagai forum musyawarah tertinggi masyarakat adat Raja Ampat untuk memperkuat persatuan, memperkokoh kelembagaan adat, menyepakati agenda perjuangan bersama, membangun kepemimpinan lintas generasi, memperluas solidaritas nasional dan internasional, serta memperkuat posisi masyarakat adat sebagai pemegang hak dan mitra strategis dalam pembangunan Raja Ampat.

2.4 TUJUAN

Tujuan Umum

Memperkuat posisi masyarakat adat Raja Ampat sebagai pemegang hak, penjaga wilayah adat, serta aktor utama dalam perlindungan keanekaragaman hayati, ketahanan iklim, dan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Tujuan Khusus

1. Mengonsolidasikan seluruh suku dan sub-suku masyarakat adat Raja Ampat dalam satu forum musyawarah bersama.
2. Menyepakati Agenda Bersama Masyarakat Adat Raja Ampat sebagai arah perjuangan kolektif masyarakat adat.
3. Menetapkan Peta Jalan Forum Pemuda Adat Raja Ampat sebagai kerangka regenerasi kepemimpinan masyarakat adat.
4. Menetapkan Peta Jalan Forum Perempuan Adat Raja Ampat sebagai strategi penguatan kepemimpinan dan partisipasi perempuan adat.
5. Memperkuat solidaritas masyarakat adat Raja Ampat dengan masyarakat adat dari wilayah lain di Indonesia, khususnya masyarakat adat pulau-pulau kecil.
6. Memperluas jejaring kemitraan nasional dan internasional dalam mendukung pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat.
7. Memperkuat diplomasi masyarakat adat Raja Ampat dalam isu perlindungan wilayah adat, konservasi, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan.
8. Menghasilkan **Deklarasi Arborek 2026** sebagai komitmen bersama seluruh peserta dalam memperkuat masyarakat adat dan menjaga keberlanjutan Raja Ampat.

2.5 HASIL YANG DIHARAPKAN

Penyelenggaraan **HEYUL PELEI KORANU FYAK** diharapkan menghasilkan keluaran strategis sebagai berikut:

1. Deklarasi Arborek 2026.
2. Agenda Bersama Masyarakat Adat Raja Ampat.
3. Peta Jalan Forum Pemuda Adat Raja Ampat.
4. Peta Jalan Forum Perempuan Adat Raja Ampat.



SK Menteri Hukum RI No. AHU-0007962.AH.01.04.Tahun 2025
Jl. Janis KPR BRI No 15 Kilometer 13, Klamana, Sorong Timur, Papua Barat Daya.
Institut.usba@gmail.com - www.institutusba.org

5. Rencana Aksi Bersama Masyarakat Adat Raja Ampat.
6. Pernyataan Solidaritas Masyarakat Adat.
7. Penguatan jejaring kerja sama masyarakat adat di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
8. Terbangunnya kolaborasi multipihak dalam mendukung pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.
9. Meningkatnya dukungan publik terhadap perlindungan masyarakat adat, hutan Papua, dan keberlanjutan Raja Ampat melalui kampanye dan komunikasi publik.
10. Menguatnya posisi masyarakat adat Raja Ampat sebagai bagian dari gerakan global dalam perlindungan keanekaragaman hayati dan aksi iklim.

BAB III

DESAIN PENYELENGGARAAN

3.1 TEMA KEGIATAN

HEYUL PELEI KORANU FYAK

"Menguatkan Persaudaraan Adat, Menyatukan Agenda Bersama, Menjaga Tanah dan Laut Raja Ampat untuk Dunia."

Tema ini mencerminkan semangat masyarakat adat Raja Ampat untuk memperkuat persatuan lintas suku dan sub-suku, membangun kesepakatan bersama dalam menjaga wilayah adat, serta menegaskan kontribusi masyarakat adat terhadap perlindungan keanekaragaman hayati, pulau-pulau kecil, dan iklim global.

3.2 WAKTU DAN TEMPAT

Waktu Pelaksanaan

20–23 Agustus 2026

- 20 Agustus 2026 : Kedatangan peserta, registrasi, dan penyambutan.
- 21 Agustus 2026 : Pembukaan, Dialog Multipihak, dan Musyawarah Masyarakat Adat.
- 22 Agustus 2026 : Forum Tematik, Forum Solidaritas, Dialog Kebudayaan, Pleno, Deklarasi Arborek 2026, dan Penutupan.
- 23 Agustus 2026 : Kepulangan peserta.

Tempat

Kampung : Arborek
Distrik : Meos Mansar
Kabupaten : Raja Ampat
Provinsi : Papua Barat Daya



SK Menteri Hukum RI No. AHU-0007962.AH.01.04.Tahun 2025
Jl. Janis KPR BRI No 15 Kilometer 13, Klamana, Sorong Timur, Papua Barat Daya.
Institut.usba@gmail.com - www.institutusba.org

3.3 PESERTA

HEYUL PELEI KORANU FYAK direncanakan diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri atas:

Unsur Masyarakat Adat

- Ketua dan Pengurus Lembaga Adat.
- Perwakilan setiap suku dan sub-suku masyarakat adat Raja Ampat.
- Tetua adat.
- Pemuda adat.
- Perempuan adat.
- Tokoh agama.
- Tokoh masyarakat.

Pemerintah dan Mitra

- Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
- Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
- Pemerintah Distrik.
- Pemerintah Kampung.
- Balai dan instansi teknis terkait.
- Akademisi.
- Organisasi masyarakat sipil.
- Mitra pembangunan.

Delegasi Nasional dan Internasional

- Perwakilan masyarakat adat dari berbagai daerah di Indonesia.
- Delegasi masyarakat adat internasional.
- Organisasi internasional.
- Media nasional dan internasional.

3.4 NILAI-NILAI DASAR

Seluruh rangkaian **HEYUL PELEI KORANU FYAK** diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai:

- Persaudaraan.
- Musyawarah dan mufakat.
- Penghormatan terhadap adat dan budaya.
- Kesetaraan.
- Inklusivitas.
- Keadilan.
- Solidaritas.



SK Menteri Hukum RI No. AHU-0007962.AH.01.04.Tahun 2025
Jl. Janis KPR BRI No 15 Kilometer 13, Klamana, Sorong Timur, Papua Barat Daya.
Institut.usba@gmail.com - www.institutusba.org

- Kepemimpinan kolektif.
- Keberlanjutan.
- Perlindungan tanah, laut, hutan, dan pulau-pulau kecil.

3.5 STRUKTUR DAN RANGKAIAN MUSYAWARAH

Pelaksanaan **HEYUL PELEI KORANU FYAK** disusun dalam lima tahapan utama yang saling berkaitan sebagai satu rangkaian proses musyawarah masyarakat adat.

Tahap I

Pembukaan dan Dialog Multipihak

Tahap pembukaan menjadi ruang bersama yang mempertemukan masyarakat adat, pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, media, serta delegasi masyarakat adat nasional dan internasional. Dialog ini bertujuan membangun pemahaman bersama mengenai kondisi masyarakat adat Raja Ampat, tantangan perlindungan wilayah adat, konservasi berbasis masyarakat, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, serta peluang kolaborasi pada masa mendatang.

Tahap II

Musyawarah Masyarakat Adat

Forum musyawarah internal masyarakat adat untuk membahas dan menyempurnakan 14 Pokok Arah Perjuangan Masyarakat Adat Raja Ampat menjadi Agenda Bersama Masyarakat Adat Raja Ampat, sekaligus menyusun Peta Jalan Forum Pemuda Adat, Peta Jalan Forum Perempuan Adat, dan berbagai rekomendasi strategis masyarakat adat.

Tahap III

Forum Solidaritas

Forum pertukaran pengalaman antara masyarakat adat Raja Ampat dengan masyarakat adat dari berbagai wilayah Indonesia dan dunia mengenai perlindungan wilayah adat, konservasi, perubahan iklim, hak masyarakat adat, dan pengelolaan pulau-pulau kecil.

Tahap IV

Dialog Kebudayaan dan Aksi Bersama untuk Alam

Tahap ini menjadi ruang ekspresi budaya melalui pertunjukan seni budaya, pertukaran pengetahuan masyarakat adat lintas benua, pameran budaya, penanaman mangrove, aksi konservasi pesisir dan laut, serta berbagai kegiatan yang memperkuat persaudaraan dan komitmen menjaga alam.

Tahap V

Pleno, Deklarasi Arborek 2026, dan Penutupan

Tahap akhir merupakan sidang pleno untuk menyampaikan dan mengesahkan hasil musyawarah yang kemudian ditetapkan melalui Deklarasi Arborek 2026, Agenda Bersama Masyarakat Adat Raja Ampat, Peta Jalan Forum Pemuda Adat, Peta Jalan Forum Perempuan Adat, serta Rencana Aksi Bersama Masyarakat Adat Raja Ampat 2026–2030.



SK Menteri Hukum RI No. AHU-0007962.AH.01.04.Tahun 2025
Jl. Janis KPR BRI No 15 Kilometer 13, Klamana, Sorong Timur, Papua Barat Daya.
Institut.usba@gmail.com - www.institutusba.org

3.6 FORUM TEMATIK

Sebagai bagian dari proses musyawarah, akan diselenggarakan beberapa forum tematik sebagai berikut:

- Forum Tetua Adat.
- Forum Perempuan Adat.
- Forum Pemuda Adat.
- Forum Solidaritas Masyarakat Adat Pulau-Pulau Kecil.
- Forum Pertukaran Pengetahuan Masyarakat Adat Lintas Benua (*Indigenous Knowledge Exchange*).

3.7 AKSI BERSAMA

HEYUL PELEI KORANU FYAK juga dirangkaikan dengan berbagai aksi kolaboratif sebagai bentuk komitmen masyarakat adat terhadap perlindungan lingkungan, antara lain:

- Penanaman mangrove.
- Rehabilitasi atau transplantasi terumbu karang (sesuai kondisi lokasi).
- Konsolidasi Pemuda Adat untuk Perlindungan Hutan, Laut dan Keanekaragaman Hayati.
- Pagelaran budaya bertajuk "Merawat Keragaman dan Persaudaraan".
- Aksi simbolik masyarakat adat dalam menjaga tanah, laut, dan pulau-pulau kecil.

3.8 STRATEGI KOMUNIKASI DAN KAMPANYE

Untuk memperluas dukungan publik terhadap masyarakat adat dan Raja Ampat, kegiatan ini didukung oleh strategi komunikasi yang meliputi:

- Dokumentasi foto dan video.
- Testimoni peserta.
- Kolaborasi dengan Key Opinion Leaders (KOL).
- Program Deep Diving Raja Ampat (Terrestrial & Marine).
- Publikasi media cetak, elektronik, digital, dan media sosial.

3.9 HASIL YANG DIHARAPKAN

Output

- Deklarasi Arborek 2026.
- Agenda Bersama Masyarakat Adat Raja Ampat.
- Peta Jalan Forum Pemuda Adat Raja Ampat.
- Peta Jalan Forum Perempuan Adat Raja Ampat.
- Rencana Aksi Bersama Masyarakat Adat Raja Ampat 2026–2030.
- Pernyataan Solidaritas Masyarakat Adat Pulau-Pulau Kecil.



SK Menteri Hukum RI No. AHU-0007962.AH.01.04.Tahun 2025
Jl. Janis KPR BRI No 15 Kilometer 13, Klamana, Sorong Timur, Papua Barat Daya.
Institut.usba@gmail.com - www.institutusba.org

- Jejaring kerja sama nasional dan internasional.
- Komitmen multipihak dalam mendukung masyarakat adat.

Outcome

- Menguatnya persatuan masyarakat adat Raja Ampat.
- Menguatnya kepemimpinan adat lintas generasi.
- Menguatnya posisi masyarakat adat dalam kebijakan pembangunan.
- Menguatnya diplomasi masyarakat adat di tingkat nasional dan internasional.
- Meningkatnya dukungan publik terhadap perlindungan Raja Ampat.
- Terbangunnya kolaborasi jangka panjang dalam perlindungan wilayah adat, konservasi, dan pembangunan berkelanjutan.

BAB IV

PENYELENGGARA KEGIATAN

4.1 PENYELENGGARA

HEYUL PELEI KORANU FYAK (Jumpa Akbar Masyarakat Adat Raja Ampat) diselenggarakan secara kolaboratif oleh Forum Gelar Senat Raja Ampat, Institut Unggul Sinergi Byak Abadi (Institut USBA), serta didukung oleh berbagai mitra pembangunan.

Forum Gelar Senat Raja Ampat merupakan forum bersama masyarakat adat yang berperan sebagai pengarah utama dalam penyelenggaraan musyawarah akbar, memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan nilai-nilai adat, hasil-hasil konsolidasi masyarakat adat, serta arah perjuangan yang telah disepakati bersama.

Institut USBA bertindak sebagai penyelenggara teknis dan sekretariat pelaksana yang bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dokumentasi, komunikasi, serta tindak lanjut hasil musyawarah bersama para mitra.

Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan wujud kolaborasi antara masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, pemerintah, dan berbagai mitra dalam memperkuat persatuan masyarakat adat Raja Ampat, melindungi wilayah adat, serta mendorong pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

4.2 PERAN PARA PIHAK

Forum Gelar Senat Raja Ampat

Berperan sebagai pengarah utama penyelenggaraan kegiatan dengan tugas:

- Memberikan arahan strategis penyelenggaraan musyawarah.
- Menjaga substansi dan nilai-nilai adat dalam seluruh proses kegiatan.
- Memimpin proses pengambilan keputusan masyarakat adat.
- Mengawal pelaksanaan hasil-hasil musyawarah.

Institut Unggul Sinergi Byak Abadi (Institut USBA)



SK Menteri Hukum RI No. AHU-0007962.AH.01.04.Tahun 2025
Jl. Janis KPR BRI No 15 Kilometer 13, Klamana, Sorong Timur, Papua Barat Daya.
Institut.usba@gmail.com - www.institutusba.org

Berperan sebagai penyelenggara teknis dan sekretariat pelaksana dengan tugas:

- Menyusun perencanaan dan desain kegiatan.
- Mengoordinasikan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut kegiatan.
- Menyediakan dukungan administrasi, logistik, dan operasional.
- Memfasilitasi komunikasi, dokumentasi, publikasi, dan hubungan media.
- Menyusun laporan pelaksanaan dan dokumen hasil musyawarah.

Mitra Pembangunan

Mitra pembangunan berperan memberikan dukungan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing, baik dalam bentuk dukungan teknis, pendampingan, fasilitasi, maupun dukungan sumber daya untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan **HEYUL PELEI KORANU FYAK**.

4.3 MITRA PENYELENGGARA

Penyelenggaraan **HEYUL PELEI KORANU FYAK** didukung oleh berbagai mitra strategis, antara lain:

- Lembaga-lembaga adat masyarakat Raja Ampat.
- Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
- Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
- Pemerintah kampung.
- Perguruan tinggi.
- Organisasi masyarakat sipil.
- Mitra pembangunan.
- Jaringan masyarakat adat nasional.
- Jaringan masyarakat adat internasional.
- Media massa.

Kemitraan dibangun atas dasar kesetaraan, saling menghormati, transparansi, dan komitmen bersama dalam memperkuat

BAB V

PENUTUP

HEYUL PELEI KORANU FYAK (Jumpa Akbar Masyarakat Adat Raja Ampat) merupakan puncak dari rangkaian proses konsolidasi masyarakat adat yang telah dimulai melalui Forum Gelar Senat Raja Ampat, Rapat Koordinasi Forum Gelar Senat Raja Ampat, dan Sekolah Kader Masyarakat Adat Raja Ampat Tahun 2026. Forum ini diharapkan menjadi ruang musyawarah bersama untuk memperkuat persatuan, menyepakati arah perjuangan, serta memperteguh peran masyarakat adat dalam menjaga tanah, laut, hutan, dan pulau-pulau kecil Raja Ampat.

Melalui penyelenggaraan forum ini diharapkan lahir kesepakatan bersama yang diwujudkan dalam Deklarasi Arborek 2026, Agenda Bersama Masyarakat Adat Raja Ampat, serta berbagai rekomendasi strategis sebagai pedoman penguatan masyarakat adat dan perlindungan wilayah adat di masa mendatang.



SK Menteri Hukum RI No. AHU-0007962.AH.01.04.Tahun 2025
Jl. Janis KPR BRI No 15 Kilometer 13, Klamana, Sorong Timur, Papua Barat Daya.
Institut.usba@gmail.com - www.institutusba.org

Keberhasilan **HEYUL PELEI KORANU FYAK** memerlukan dukungan dan partisipasi seluruh pihak, baik masyarakat adat, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha, media, maupun mitra pembangunan. Dengan semangat persaudaraan, musyawarah, dan gotong royong, diharapkan forum ini menjadi langkah bersama dalam mewujudkan Raja Ampat yang lestari, berkeadilan, dan berkelanjutan.

LAMPIRAN I

RUNDOWN KEGIATAN

HEYUL PELEI KORANU FYAK

(Jumpa Akbar Masyarakat Adat Raja Ampat)

20–23 Agustus 2026

Kampung Arborek, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya

Kamis, 20 Agustus 2026

KEDATANGAN PESERTA, PENYAMBUтан, DAN MALAM KEBUDAYAAN

Waktu	Kegiatan
16.00–17.00	Penjemputan peserta di Waisai dan persiapan keberangkatan menuju Kampung Arborek
17.00–18.30	Perjalanan laut Waisai – Arborek
18.30–19.00	Penyambutan adat peserta oleh masyarakat Kampung Arborek
19.00–19.30	Registrasi ulang peserta dan penempatan homestay
19.30–20.30	Ishoma / makan malam bersama
20.30–23.00	Malam Kebudayaan I – Penyambutan dan Persaudaraan (tarian adat, musik tradisional, cerita rakyat, bertutur dan bernyanyi, pengenalan peserta, serta berbagi kebudayaan lintas suku dan lintas negara)

Jumat, 21 Agustus 2026

PEMBUKAAN, DIALOG MULTIPIHAK, FORUM PARALEL, PLENO, DAN MALAM KEBUDAYAAN

Waktu	Kegiatan
08.00–09.00	Registrasi dan persiapan pembukaan
09.00–10.00	Upacara Pembukaan HEYUL PELEI KORANU FYAK
10.00–12.00	Dialog Multipihak “Masyarakat Adat Penjaga Raja Ampat, Laut, Pulau-Pulau Kecil, dan Masa Depan Iklim Dunia”
12.00–13.30	Ishoma
13.30–15.30	Forum Paralel • Forum Tetua Adat • Forum Perempuan Adat • Forum Pemuda Adat • Forum Solidaritas Masyarakat Adat Pulau-Pulau Kecil dan Dialog Internasional



SK Menteri Hukum RI No. AHU-0007962.AH.01.04.Tahun 2025
Jl. Janis KPR BRI No 15 Kilometer 13, Klamana, Sorong Timur, Papua Barat Daya.
Institut.usba@gmail.com - www.institutusba.org

Waktu	Kegiatan
15.45–17.45	Sidang Pleno Bersama – penyampaian hasil forum-forum, perumusan agenda bersama, dan peneguhan arah perjuangan masyarakat adat Raja Ampat
17.45–19.00	Istirahat dan makan malam
19.00–23.30	Malam Kebudayaan II – Berbagi Kebudayaan sampai Malam (pertunjukan budaya, musik tradisional, puisi, teater rakyat, bertutur dan bernyanyi, serta solidaritas budaya lintas kampung dan lintas negara)

Sabtu, 22 Agustus 2026

AKSI EKOLOGI, KEGIATAN SOSIAL, MALAM BUDAYA, DAN DEKLARASI

Waktu	Kegiatan
08.00–08.30	Pembagian kelompok aksi
08.30–12.00	Aksi Ekologi dan Kegiatan Sosial Bersama • Penanaman mangrove • Transplantasi terumbu karang • Edukasi lingkungan dan budaya bahari • Photo flotilla dan dokumentasi media
12.00–13.30	Ishoma
13.30–15.00	Refleksi hasil aksi ekologi dan peneguhan komitmen bersama menjaga Raja Ampat
15.00–16.30	Perumusan akhir Deklarasi Arborek 2026 dan penyiapan penandatanganan bersama
16.30–18.30	Istirahat, persiapan malam penutupan, dan kunjungan pameran budaya serta ekonomi kreatif
19.00–21.00	Malam Kebudayaan III – Malam Solidaritas dan Penutupan (pertunjukan budaya, musik tradisional, tarian adat, puisi, bertutur dan bernyanyi, serta perayaan persaudaraan masyarakat adat)
21.00–21.45	Pembacaan dan Penandatanganan Deklarasi Arborek 2026 sebagai puncak komitmen bersama masyarakat adat Raja Ampat dan sahabat solidaritas dunia
21.45–22.00	Penutupan Resmi HEYUL PELEI KORANU FYAK

Minggu, 23 Agustus 2026

KEPULANGAN PESERTA

Waktu	Kegiatan
06.30–08.00	Sarapan dan persiapan Keberangkatan
08.00–12.00	Check-out homestay dan keberangkatan peserta menuju Waisai/Sorong sesuai jadwal transportasi
Selesai	Kepulangan peserta